TAJUK RENCANA

Kampanye Masif Protokol Kesehatan

PEMERINTAH daerah, khususnya di jajaran Pemda DIY, masih terus melakukan kampanye protokol kesehatan kepada masyarakat. Namun, sejauh ini belum bisa diukur efektivitasnya, karena nyatanya masih ada sebagian masyarakat yang mengabaikannya. Dalam konteks itu, kiranya relevan apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan kampanye masif mengenai protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 , mengingat jumlah kasus positif korona di Indonesia terus bertambah. Instruksi tersebut mestinya juga direspons seluruh pejabat di daerah untuk melakukan hal yang sama, yakni memutus rantai penularan Covid-19.

Hemat kita, kampanye masif berbeda dengan kampanye yang biasa-biasa saja yang sekadar menyampaikan program dan setelah itu selesai. Kita menerjemahkan kampanye masif bukan sekadar sosialisasi program, melainkan lebih dari itu, yakni memberi literasi kepada masyarakat tentang pentingnya menegakkan protokol kesehatan demi kepentingan umat manusia, bukan sekadar kepentingan keselamatan pribadi.

Kampanye itu harus dilakukan secara sistematis dan total dengan memobilisasi seluruh komponen kekuatan bangsa, baik dari unsur Polri, TNI, relawan, tokoh masyarakat, ulama, tokoh pemuda dan lain-lain. Kita memang mengharapkan kesadaran serta partisipasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di semua tempat dan semua kesempatan. Namun bila kondisinya sudah sulit dikendalikan, tentu butuh pendekatan yang lebih tegas lagi, yakni dengan menerapkan mekanisme pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan.

Berkaca pada hasil survei di Jawa Timur yang menunjukkan bahwa 70 persen warga tidak mengenakan masker saat berada di luar rumah, wajar bila muncul kekhawatiran bahwa pandemi ini masih berlangsung lama, lantaran ketidakdisiplinan warga. Tak mengherankan bila jumlah terbanyak pasien positif Covid-19 ditemukan di Jawa Timur yang boleh dibilang sebagai episentrumnya virus korona. Hemat kita, karena kondisinya sudah mengkhawatirkan, pendekatan hukum yakni memberi sanksi kepada pelanggar menjadi pilihan yang paling masuk akal agar mereka jera.

Bagaimana dengan DIY ? Saat ini kondisinya memang tidak seperti Jawa Timur. Namun bila kita lengah dan banyak memberi toleransi terhadap pelanggaran protokol kesehatan, bisa saja kondisinya tak jauh beda. Hanya saja, sejauh ini belum ada survei berapa persentase warga yang tidak memakai masker saat berada di luar rumah. Survei ini sebenarnya penting untuk memetakan populasi warga yang taat dan tidak taat protokol. Sejauh ini survei hanya melihat sejauh mana persepsi masyarakat terhadap penerapan era kenormalan baru, sehingga tak bisa mengukur sejauh mana ketaatan warga pada protokol kesehatan.

Kita menganggap survei ketaatan terhadap protokol kesehatan ini penting guna menentukan langkah yang tepat agar penularan virus korona tidak semakin menjadi-jadi, sebaliknya ditekan seminimal mungkin hingga mencapai nol kasus positif. Memang ini butuh kerja keras semua pihak. Kita sepakat dengan gerakan kampanye masif mengenai protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Gerakan tersebut bukan hanya di level pusat, tapi juga daerah. Begitu pula mobilisasi seluruh kekuatan komponen bangsa dengan melibatkan TNI, Polri dan stake holder harus dilakukan, karena akan sangat menentukan efektivitas kampanye tersebut. ❑ - o

Tinggi, Angka KDRT di Masa Pandemi

Fadmi Sustiwi

SEBUAH berita kecil di harian ini, berjudul 'Cekcok Meningkat, Istri Gugat Cerai' (Minggu, 12/7) mengusik perhatian penulis. Kasus yang terjadi di Kabupaten Pekalongan itu mengungkap, dalam masa wabah Covid-19 (Januari - Juni) terdapat 743 kasus gugat cerai (diajukan perempuan) dan 213 cerai talak (diajukan laki-laki). Kian mengusik, pada Juni yang disebut mengawali new normal, mencapai 227 gugat cerai dan 46 kasus talak. Melonjak dibanding bulan-bulan sebelumnya.

Memang tidak diungkap sebab terjadinya gugat cerai. Namun dalam masa wabah, indikasi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumahtangga (KDRT), menjadi fenomena dunia. Wabah bukan membuat orang *work form home, study from home* saja. Namun juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan perusahaan atau bahkan penghentian usaha.

April silam Sekjen PBB Antonio Guterres dalam video berdurasi sekitar 2 menit sudah mengingatkan. Menurutnya, *"damai bukan hanya tidak adanya perang. Banyak perempuan yang melakukan karantina karena Covid-19 menghadapi kekerasan di mana mereka seharusnya paling aman: di rumah mereka sendiri"*. Guterres bahkan menyebut melalui akun twitter pribadinya (6/4) "telah terjadi gelombang KDRT mengerikan berskala global".

Menjebak Perempuan

Secara global ada potensi peningkatan kekerasan di dalam zona yang seharusnya membuat perempuan aman : di rumah sendiri. Artinya, ini persoalan serius yang tidak bisa diabaikan. Imbauan 'semua dari rumah' diakui atau tidak telah menjadi bertambahnya beban perempuan. Dan 'semua dari rumah', karantina atau *lockdown* yang sangat penting untuk menanggulangi persebaran virus korona, disebut Guterres dapat menjebak perempuan dengan pasangan yang kerap melakukan kekerasan. Padahal perempuan yang berkarir tetap dituntut selaras menjaga beban domestik. Tuntutan ini tidak ada pada lelaki, pasangan berumah tangga.

Tak heran bila angka kasus kekerasan di Indonesia juga meningkat dan berimbas pada meningkatkan angka perceraian. Survei daring Komnas Perempuan yang dipaparkan pada media awal Juni lalu mengungkap, ketika 'semua dari rumah' ternyata 10,3% responden merasakan hubungan suami ñ isteri kian tegang. Bahkan 80% responden dari 34 provinsi yang diambil acak mayoritas berusia 31 ñ 40 tahun dengan penghasilan di bawah Rp 5 juta mengakui ada peningkatan kekerasan yang dialami atau diketahui. Tentu, kekerasan bukan hanya fisik namun juga psikhis dan ekonomi. Dan tekanan ekonomi memberi pengaruh kuat serta berpotensi terjadinya KDRT.

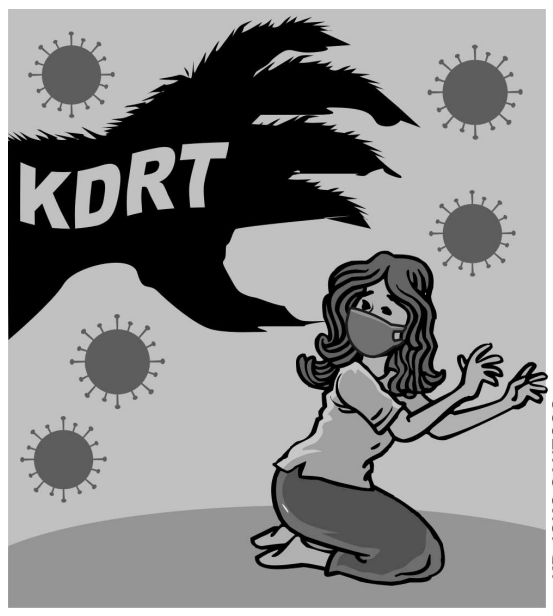

KR-JOKO SANTOSO

Secara pasti angkanya belum ada, kecuali kasus perceraian di Kabupaten Pekalongan tersebut. Bahkan Kantor Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengingatkan untuk mewaspadai adanya kasus-kasus KDRT tersembunyi (KR, 14/6). Karena budaya dan ajaran untuk tidak membuka aib rumahtangga, membuat banyak kasus KDRT tersimpan rapi.

Adil dan Setara

Realita serius dan tidak bisa diabaikan. Kita belum tahu, sampai kapan pandemi akan berlalu. Hanya tentu saja, kita tidak ingin korban KDRT terus berjatuhan. Bukankah beberapa hari terakhir ini kita mendengar korban kekerasan seksual pada anak-anak yang dilakukan entah paman, ayah tiri atau yang lain yang terjadi dalam lingkup rumah tangga? Kita tentu tidak ingin mendengar lagi hal itu, termasuk tingginya kasus perceraian dan yang lainnya.

Maka, penanganan wabah selain harus memiliki *sence of crisis* juga perlu panduan berperspektif jender dalam menangani bencana yang disesuaikan dengan wabah Covid-19. Pemerintah termasuk di daerah pun perlu melihat kembali, apakah kebijakan terkait penanganan Covid-19 sudah dilakukan dengan perspektif yang lebih adil dan setara jender?

Ini adalah persoalan serius yang kita hadapi bersama. Ketika 'semua dari rumah', dalam realita banyak rumah tidak aman untuk anggota keluarga. ❑ - o

)Fadmi Sustiwi**, jurnalis pemerhati keadilan jender.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email *pikiranpembaca@gmail.com.* Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah

DUNIA pendidikan di Tanah Air kini tengah menghadapi perubahan besar dan mendasar dengan memanfaatkan keberadaan teknologi yang kini tengah berlangsung. Pandemi Covid-19 layaknya sebuah *try out* untuk sistem pendidikan dan akan terus berkembang dan berubah. Masyarakat dalam segala bidang harus siap beradaptasi dengan kebiasaan baru untuk berdampingan dengan Covid-19 yang sering disebut juga dengan era New Normal. Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di sekolah harus dilakukan agar tetap survive dalam memberikan layanan pendidikan meskipun berada di tengah pandemi dan ketidakpastian.

Tahun ajaran baru kali ini banyak diwarnai berbagai hal yang betul-betul baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah mengikuti serangkaian aturan pendaftaran siswa baru secara *online*, masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) siswa barupun masih harus dilakukan secara virtual dengan berbagai modifikasi tampilan melalui berbagai kanal informasi (web, youtube, IG, twiter dan lain-lain). Hal ini dilakukan agar para siswa baru tetap bersemangat mengenal lingkungan sekolah yang akan mereka masuki dengan penuh kegembiraan sesuai dengan era milenialnya.

Menghadapi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di dunia pendidikan, para guru dipastikan tengah bekerja keras untuk remodeling dalam mengawal kegiatan belajar mengajar. Setelah selama hampir empat bulan para insan pendidikan dipaksa dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pada masa AKB kali ini diharapkan PJJ sudah dapat dilakukan dengan lebih tertata dan terarah. PJJ harus menyenangkan, penuh makna, membangkitkan kreativitas, daya kritis dan mampu membuat siswa mandiri.

Me*review* kembali Kompetensi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) telah dilakukan oleh pengelola kurikulum sekolah agar kegiatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan tuntutan kurikulum dan kebiasaan baru yang harus dihadapi. Administrasi pendidik dan materi ajar pun dikemas sedemikian rupa agar dapat memenuhi harapan semua pihak meskipun tidak seoptimal jika keadaan normal.

Pengaturan jadwal PJJ juga diatur dengan mempertimbangkan usulan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yaitu disesuaikan dengan perumusan protokol *new normal* di sekolah. Sekolah yang berada pada zona hijau penyelenggaraan pembelajaran boleh dilakukan dengan pembelajaran tatap muka tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Untuk menghindari berkumpulnya banyak siswa serta menjaga agar siswa tidak kelelahan, maka dilakukan pola pengaturan durasi belajar (dalam sehari siswa tidak lebih dari empat jam belajar) serta pengaturan *sift*. Dengan demikian ketika siswa pulang dan datang tidak saling berpapasan sehingga kerumunan dapat diminimalisir. Sedangkan pada sekolah yang berada pada zona kuning, kegiatan pembelajaran masih tetap dilakukan dalam jejaring (daring).

Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah juga menjadi bagian penting dalam mengimplementasikan AKB di sekolah. Selain pengadaan sarana cuci tangan dengan sabun di tempat-tempat strategis, sarana lain seperti masker dan hand sanitizer juga menjadi tuntutan kelengkapan yang harus diprioritaskan. Berbagai poster afirmasi agar semua warga sekolah konsisten terhadap protokol kesehatan, terlihat menghiasi dan menempel hampir di setiap pojok area sekolah.

Penerapan protokol kesehatan secara ketat harus diterapkan di setiap sekolah sebagai bentuk Adaptasi Kebiasaaan Baru (AKB) agar dapat mendatangkan rasa aman dan nyaman bagi semua warga sekolah menuju *new normal*. ❑ - o

Nurlaila Mahmudah
Guru Matematika, SMKN 3 Yogya.

Mengayuh Cerita 'Onthel'

Heri Priyatmoko

BAK laron di musim hujan, sepeda kayuh membanjiri jalanan. Tiba-tiba banyak orang gandrung mengendarai kereta angin di era pandemi. Tampak pula pertokoan sepeda dijejali rombongan pembeli yang rela antre. Bahkan datang lebih awal mengalahkan petugas pembuka pintu toko.

Ya, kita tengah menjaga hidup sehat dengan bersepeda. Yang tidak mudah dilakukan adalah kesetiaan mengayuh sepeda kumbang hingga usia senja. Apalagi, berangkat bekerja *ngonthel*. Di Indonesia, barangkali hanya sejarawan Suyatno Kartodirdjo yang mampu melakukannya. Doktor kelahiran Sragen pada 17 Agustus 1940 tersebut mengaku sedari kecil gemar mengayuh sepeda. Dosen di Universitas Sebelas Maret itu bekerja ditemani sepeda jengki. Gelar doktor yang digondolnya dari kampus ternama di Australia tak membuatnya sungkan menggenjot pedal dari rumah di utara bekas Kraton Pajang. Sepeda dipensiunkan dalam usianya hampir 7 dekade setelah tulangnya tak kuat gara-gara jatuh.

Bagi Suyatno dan komunitas onthelis sejati tentu teringat lagu 'Kring-kring' yang dirakit Hardjasoebrata (1905-1986). Petikan syair 'Simplek nganggo berko' ini menjadi jejak zaman kecintaan masyarakat Indonesia pada sepeda setengah abad silam. Lagu itu pernah beken tatkala Ki Nartosabda, dalang ternama cum seniman gending, menggarap ulang. Tembang yang berdengar jenaka tersebut adalah bukti sejarah betapa tinggi nilai sepeda kala itu. Terlebih lagi sepeda yang bermerk Simplex, disertai pula berko. Tempo itu pemilik sepeda Simplex menepuk dada dan memamerkan kepada kawan-kawannya.

Pengalaman Pahit

Sepeda bukan sebatas sarana olahraga. Negeri ini punya pengalaman pahit dijajah Belanda yang berhasil menggeser *turangga* (kuda) milik bangsawan atau elite lokal dengan sepeda kayuh sebagai gaya hidup di Hindia Belanda. Opas Belanda berpatroli mengelilingi kota mengendarai sepeda bersenjatakan pentungan. Martabatnya tidak melorot sekalipun di jalan raya bersimpangan dengan kereta bangsawan yang ditarik beberapa ekor kuda teji.

Kakek maestro tari Sardono W Kusuma (75 tahun), Mas Ngabehi Manguncarma, yang menjalankan bisnis menyewakan kuda mendapat tantangan berat dengan munculnya alat transportasi sepeda pada dekade kedua abad XX. Pasalnya, onthel detik itu merupakan barang mewah baru yang mulai dilirik kaum berduit.

Fenomena historis awal kejayaan sepeda ditangkap oleh sastrawan Raden Tumenggung Jasawidagda dan dituangkan dalam novel *Kirti Njunjung Drajat* (1924). Melalui sepeda, Jasawidagda menjungkirbalikkan pandangan atau prinsip umum priyayi bahwa orang bila ingin terhormat harus menjadi pegawai gubernemen atau pelayan kerajaan. Dikisahkan, tokoh Darba prigel memperbaiki serta menjual sepeda selepas nekat ke luar dari pekerjaan magang sebagai abdi dalem. Usaha bengkel sepedanya ternyata laris diserbu pelanggan orang Belanda, Tionghoa, dan Jawa yang tergila-gila dengan sepeda. Guna memenuhi banyaknya permintaan pelanggan, dirinya mengangkat karyawan.

Kekayaan

Jago di bidang sepeda, maka Darba memperoleh posisi penting di pabrik sepeda Tropikal Semarang tahun 1908. Berkat menggeluti sepeda dan memiliki duit sekarung, lelaki yang semula dimarahi orangtuanya yang mendamba prinsip priayi itu, derajatnya terkerek. Tak puas dengan setumpuk kekayaan, lantas ia membeli buku untuk disantap dan mencekoki otaknya. Dengan berpengetahuan luas dan terampil berpidato. Direken dalam lingkaran organisasi Budi Utomo.

Demikianlah, Indonesia adalah sejarah sepeda. Sekaligus, 'lahan basah' pebisnis sepeda dari waktu ke waktu. Sepeda juga mengantarkan orang merengkuh kekayaan, pengetahuan, dan kehormatan. Setiap keluarga juga dipastikan punya cerita tentang sepeda. Sebab, sepeda merupakan barang yang lumrah menyertai satu fase perjalanan hidup manusia. ❑ - o

)Heri Priyatmoko MA**, Dosen Prodi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Founder Solo Societeit.*

Pojok KR

Menko PMK jelaskan istilah new normal.
*** Pedagang pasar tahunya kondisi sudah normal.**

Di Bantul, uji coba obwis berlangsung sebulan.
*** Tapi sebelum sebulan harus dievaluasi.**

Pemda DIY siapkan sistem tata niaga pangan.
*** Distribusi komoditas pangan harus diawasi.**

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono,. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.